

BAB I

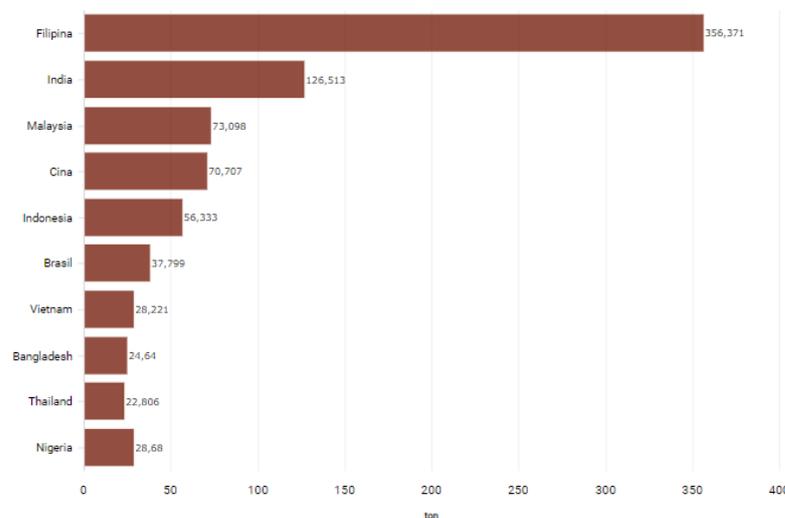
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu pencemaran lingkungan merupakan masalah kompleks di tingkat global yang mempengaruhi berbagai sektor, antara lain industri, transportasi, pertanian, dan pemukiman. Pencemaran lingkungan ini mengancam kesehatan manusia dan keberlangsungan hidup semua yang ada di bumi. Jenis pencemaran yang paling umum adalah pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran udara biasanya diakibatkan oleh asap buangan kendaraan, pabrik, dan pembakaran sampah, sedangkan pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah industri dan domestik serta tumpahan minyak. Pencemaran tanah dapat berasal dari bahan kimia berbahaya, limbah pertanian dan industri. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, termasuk organisasi nirlaba untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sampah merupakan salah satu masalah yang sangat serius, dengan jutaan ton sampah dihasilkan setiap tahun di seluruh dunia, banyak di antaranya yang tidak mudah terurai. Penumpukan sampah plastik sekali pakai, sampah elektronik, dan sampah organik dapat mencemari lingkungan, seperti incinerator atau tempat pembuangan sampah, untuk pembuangan limbah. Menurut World Bank pada tahun 2016, volume sampah di dunia yang dihasilkan oleh seluruh penduduk dunia mencapai 2,01 miliar ton per tahun dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 3,40 miliar ton pada tahun 2050.

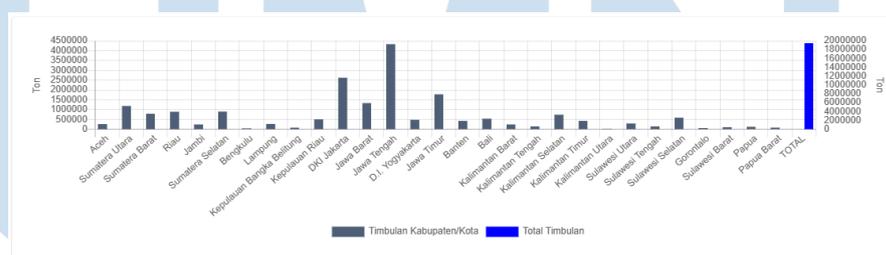
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A



Gambar 1. 1 10 Negara Penyumbang Sampah Plastik Terbanyak ke Laut

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/12/10-negara-penyumbang-sampah-plastik-terbanyak-ke-laut-ri-peringkat-berapa>

Berdasarkan data diatas, kita dapat melihat bahwa pada tahun 2021, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang menghasilkan jumlah sampah plastik yang dibuang ke laut sebesar 56,33 ton, menduduki peringkat kelima di tingkat global. Fenomena ini menunjukkan tingginya tingkat pencemaran plastik di perairan Indonesia dan menggambarkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan lingkungan.



Gambar 1. 2 Grafik Sampah di Indonesia

Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), volume sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 19,45 juta ton. Jawa Tengah menjadi salah

satu Provinsi yang menghasilkan sampah paling banyak di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia, sebanyak 4,185,487.26 juta ton pada tahun 2022.

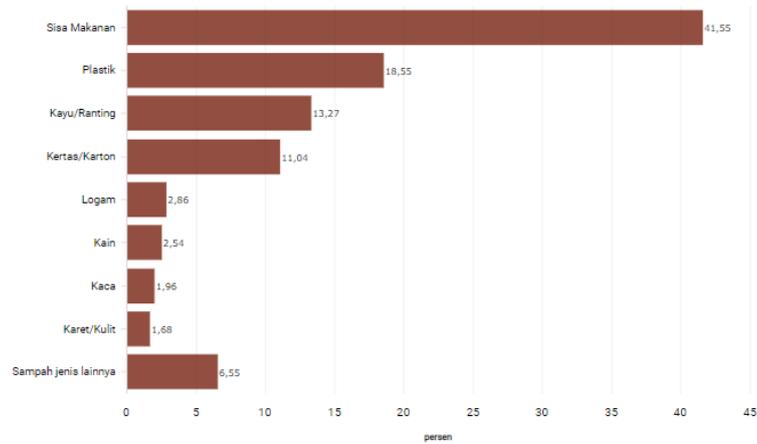
Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2022	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	140.93	51,438.36
2022	Sulawesi Barat	Kab. Majene	70.96	25,898.94
2022	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	54.95	20,057.48
2022	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	45.97	16,779.78
2022	Papua	Kab. Sarmi	16.74	6,109.95
2022	Papua	Kab. Asmat	45.55	16,624.29
2022	Papua	Kota Jayapura	217.89	79,528.32
2022	Papua Barat	Kab. Sorong	49.76	18,162.69
2022	Papua Barat	Kab. Manokwari	163.36	59,627.83
			53,268.14	19,442,872.46

Gambar 1. 3 Data Sampah di Papua dan Papua Barat

Sumber : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Meskipun volume sampah di Jawa Tengah tinggi, namun hal ini tidak mengabaikan fakta bahwa masalah sampah di Papua juga merupakan isu yang perlu diperhatikan. Terdapat wilayah Papua yang menghasilkan jumlah sampah yang signifikan berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) terdapat beberapa wilayah di Papua yang memiliki jumlah sampah yang cukup signifikan. Kabupaten Sarmi mencatatkan jumlah sampah sebesar 6,109.95 ton, sedangkan Kabupaten Asmat menghasilkan sampah sebanyak 16,624.29 ton. Kota Jayapura, sebagai ibu kota Provinsi Papua, mencatatkan jumlah sampah yang cukup tinggi yaitu sebesar 79,528.32 ton. Sementara itu, Kabupaten Sorong juga menghasilkan jumlah sampah yang signifikan dengan total 18,162.69 ton. Sementara Papua Barat, Kabupaten Sorong menyumbang 19,162.69 ton, dan Kabupaten Manokwari, Papua Barat menyumbang sampah 59,627.83 ton. Dari data ini menunjukkan bahwa masalah sampah di Papua menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, organisasi nirlaba, sektor swasta maupun masyarakat Papua.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A



Gambar 1. 4 Data Mayoritas Timbulan Sampah Nasional Pada Tahun 2022

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ri-hasilkan-19-juta-ton-timbulan-sampah-pada-2022-mayoritas-sisa-makanan>

Berdasarkan data diatas, mayoritas sampah nasional pada tahun 2022 berupa sisa makanan dengan proporsi 41,55%, diikuti dengan sampah plastik berada di urutan ke-2 dengan proporsi 18,55%. Sebanyak 13,27% sampah di Indonesia pada 2022 berupa kayu/ranting, 11,04% sampah kertas/karton, dan sampah logam 2,86%. Ada pula 2,54% sampah kain, sampah kaca 1,96%, sampah karet/kulit 1,68%, dan 6,55% sampah jenis lainnya.

Dari data-data diatas menunjukkan pentingnya untuk memperhatikan pengelolaan sampah di Indonesia. Selain itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sampah dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan demi menjaga keberlanjutan ekosistem, sumber daya alam. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, diperlukan juga upaya nyata dalam mengatasi permasalahan sampah. Isu sampah di dalam isu lingkungan menjadi salah satu masalah yang cukup serius dan menjadi perhatian di seluruh dunia. salah satu upaya nyata Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi isu lingkungan adalah program dan kebijakan yang dibuat untuk menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang memiliki fokus penting bagi dunia internasional dalam menangani masalah kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, kematian anak, kesehatan kehamilan, wabah penyakit,

lingkungan, kemitraan global. Namun, meskipun berhasil mencapai sebagian besar target, beberapa tujuan dari MDGs masih belum tercapai di beberapa negara. Oleh karena itu, MDGs digantikan oleh agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk melanjutkan upaya dan mencapai target yang belum tercapai sebelumnya. SDGs memiliki 17 tujuan penting untuk keberlanjutan, termasuk tujuan yang berkaitan dengan permasalahan sampah. Dalam mengatasi permasalahan sampah SDGs menekankan pada pengurangan dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, melalui SDG ke-12 Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan, tujuan ini mencakup target untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan meningkatkan penggunaan bahan daur ulang, serta mengurangi limbah beracun yang dibuang ke lingkungan. Selain itu SDG ke-6, Air Bersih dan Sanitasi yang memperhatikan dampak pencemaran air oleh limbah, dan SDG ke-14 Kehidupan di Bawah Air yang menekankan perlindungan terhadap laut dan ekosistemnya. Pembuangan sampah yang berakhir di laut menjadi salah satu masalah yang serius dalam aspek lingkungan dan sosial, dikarenakan dapat menyebabkan pencemaran laut dan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia serta keanekaragaman yang hidup di bawah air.

Indonesia sendiri sudah melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan sampah yang meliputi aspek pengurangan sampah, pengelolaan sampah, dan pembuangan sampah. Selain itu ada juga program yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia antara lain adalah program nasional pemberantasan sampah laut (Garbage Free Seas), program Indonesia Bersih, program Bank Sampah, Program Zero Waste City, program Waste To Energy, dan program Satu Kecamatan Satu TPA. Program-program tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang dan meningkatkan pengelolaan sampah yang baik, melalui sosialisasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Meskipun pemerintah sudah berupaya memenuhi tujuan SDGs dalam pengelolaan sampah, namun masih terdapat tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi nirlaba perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Sudah ada upaya yang dilakukan oleh yayasan nasional yang kerap mengatasi permasalahan sampah akan kesadaran masyarakat terkait masalah sampah. Non-Governmental Organizations (NGO) merupakan organisasi yang independen dan tidak tergantung pada pemerintah atau sektor bisnis, tugas mereka adalah untuk mempromosikan kepentingan publik dan melayani kebaikan publik daripada mencari keuntungan atau mendorong kepentingan sekelompok individu tertentu (Aviles, 2012).

Konservasi Indonesia (KI) merupakan salah satu yayasan nasional yang berdiri pada tahun 2021. KI merupakan mitra utama dari Conservation International (CI), lembaga Internasional yang berfokus pada isu-isu lingkungan. KI, melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh CI di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. KI bekerja untuk mendukung tujuan internasional pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah disebutkan di atas. Visi dan Misi KI adalah mencapai Indonesia yang sehat dan sejahtera dengan mengelola ekosistem penting di daratan dan lautan secara berkelanjutan, berlandaskan ilmu pengetahuan, kemitraan, dan kerja lapangan yang kuat, guna melestarikan keanekaragaman hayati demi kesejahteraan masyarakat. Partisipasi melibatkan pengakuan akan nilai-nilai, kepentingan, dan pengetahuan masyarakat lokal dalam upaya konservasi. Hal ini dapat melibatkan pembentukan kelompok kerja bersama antara masyarakat lokal, organisasi non pemerintah, pemerintah, dan para ilmuwan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, program, proyek konservasi yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat (Baldauf, 2020). KI juga bermitra dengan pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, LSM, sektor pembangunan guna menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan bersama dalam konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif, KI terus

berkomitmen untuk melindungi kekayaan alam Indonesia, memperbaiki kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh KI adalah program Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dengan tujuan untuk mendukung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat demi melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan oleh KI sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan pembelajaran yang berfokus pada aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan. PLH dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Untuk mendukung Undang-Undang Pemerintah, KI melakukan sebuah program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pendidikan lingkungan hidup formal dan non-formal.

Memastikan efektivitas dan efisiensi dalam membangun kesadaran masyarakat Papua diperlukannya dukungan dan kolaborasi bersama dengan masyarakat lokal dan juga komunitas lokal. Komunikasi partisipatif merupakan sebuah proses komunikasi dimana terjadi komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga menghasilkan suatu pemahaman sama terhadap pesan yang disampaikan (Tufté & Paolo, 2009).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh Konservasi Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat Papua terhadap permasalahan sampah?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka muncul pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana komunikasi partisipatif yang digunakan Konservasi Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat Papua terhadap permasalahan sampah?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Konservasi Indonesia dalam upaya membangun kesadaran masyarakat Papua terhadap permasalahan sampah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui komunikasi partisipatif yang digunakan oleh Konservasi Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat Papua terhadap permasalahan sampah
2. Untuk Mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Konservasi Indonesia dalam upaya membangun kesadaran masyarakat Papua terhadap permasalahan sampah

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi partisipatif yang digunakan oleh Konservasi Indonesia dalam upaya membangun kesadaran masyarakat Papua terhadap permasalahan sampah

1.5.1 Kegunaan Akademis

Pada penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memperluas kajian ilmu komunikasi serta dapat memberikan informasi tambahan, terutama dalam pengetahuan mengenai komunikasi partisipatif yang digunakan oleh Konservasi Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat Papua terhadap permasalahan sampah. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi

bagi para peneliti atau mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan mendatang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk dan metode komunikasi partisipatif yang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat Papua terhadap permasalahan sampah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu praktisi, fasilitator atau organisasi lain yang bergerak dalam bidang konservasi lingkungan dan mengembangkan komunikasi partisipatif yang dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat terkait dengan permasalahan sampah atau isu lingkungan lainnya.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Kegunaan sosial dari penelitian ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat Papua tentang pentingnya menjaga lingkungan dan meminimalkan sampah. Dengan mengetahui bentuk dan metode komunikasi partisipatif yang efektif, diharapkan Konservasi Indonesia dan fasilitator lainnya dapat meningkatkan efektivitas program dan bentuk pendekatan dalam membangun kesadaran masyarakat Papua terhadap permasalahan sampah. Hal ini diharapkan dapat memicu perubahan perilaku Masyarakat Papua dalam hal penanganan sampah dan pengelolaan lingkungan secara lebih baik dan berkelanjutan.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian yang dimana penelitian ini hanya berfokus masyarakat Papua saja, meskipun hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana komunikasi partisipatif yang dilakukan oleh Konservasi Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat Papua terhadap permasalahan sampah. Namun, terdapat keterbatasan penelitian yang dimana peneliti tidak melibatkan sudut pandang langsung dari masyarakat Papua yang merasakan langsung dan sudut pandang dari organisasi lain yang terlibat.